

PKM PENGENALAN KEKERASAN BERBASIS GENDER Bagi SATGAS SIGRAK

Dwi Astuti

e-mail: astibudiyanto@gmail.com

Prodi Sosiologi FISIPOL

Universitas Widy Mataram

Abstract

Violence against women is a serious problem facing today. Number of violence against women has not decreased, even in 2018 Indonesia facing an emergency situation of women's violence. Government's political will can be seen by the establishment of a special unit dealing with violence against women. The institution is the Technical Support Unit for the Protection of Women and Children or abbreviated as UPT PPA. This unit was formed in every sub-district in Indonesia. Including in the city of Yogyakarta. In carrying out its functions, UPT PPA does not work alone, but partners with many parties, from upstream to downstream related to cases of violence against women. Especially the most dominant are law enforcement and psychologists. To be able to reach the issue of violence against women in the community, UPT PPA also involves volunteers who live in the midst of the community. The task of the volunteers is to identify and report cases of violence against women in the vicinity of their homes. However, this task is not easy, because cases of violence against women are not always closely related to gender issues. The ability to identify and understand cases of violence against women based on gender is an important requirement. There is a need for training and empowerment of volunteers so they have knowledge, understanding of gender-based violence against women and then able to identify and distinguish cases of violence against women in general and cases of violence against women that are specifically based on gender issues. From the discussion it was concluded that several important things could be used as a basis for future steps, namely: violence against women is closely related to unfair gender relations, inequality in gender relations is the result of the construction of norms since childhood, creating equality in gender relations is not easy. when dealing with norms, what can be done is to continue to accept existing norms with the limitations of these norms not inhibiting opportunities for women's empowerment so that women have a bargaining position and are not dependent on men, thus avoiding potential acts of violence against women.

Keywords : UPT PPA, identification, gender based violence.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang dihadapi pemerintah saat ini. Angka kekerasan perempuan tidak berkurang bahkan di tahun 2018 Indonesia sempat menghadapi kondisi darurat kekerasan perempuan. Keseriusan ini dapat dilihat dengan dibentuknya unit khusus yang menangani kekerasan perempuan. Lembaga itu adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan UPT PPA. UPT ini dibentuk di setiap kecamatan yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Dalam menjalankan fungsinya UPT PPA tidak bekerja sendiri, namun bermitra dengan banyak pihak, mulai dari hulu sampai hilir terkait kasus-kasus kekerasan kepada perempuan. Terutama yang paling dominan adalah penegak hukum dan psikolog. Untuk menjangkau persoalan kekerasan perempuan sampai di tengah-tengah masyarakat, UPT PPA melibatkan sukarelawan yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Tugas dari sukarelawan adalah untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di sekitar rumah tinggal mereka. Namun tugas ini tidaklah mudah, karena kasus kekerasan terhadap perempuan tidak selalu terkait erat dengan persoalan gender. Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. Oleh karenanya, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidakadilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi/menghambat kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindari pada potensi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kta

Kata kunci : Sukarelawan UPT PPA, pengetahuan dan pemahaman, kekerasan berbasis gender.

1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Indonesia tidak terkecuali di wilayah Yogyakarta. Dari tahun ke tahun angka kekerasan perempuan melonjak. Untuk wilayah Yogyakarta sendiri, kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 895 kasus. Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati mengatakan kenaikan jumlah kasus disebabkan karena sejumlah hal, salah satunya efek pandemi Covid-19. Ia menjelaskan *pagebluk* telah menimbulkan tekanan ekonomi di tingkat keluarga. Hal itu memicu konflik yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mayoritas korban KDRT ini adalah para istri dan anak-anak.

Pemerintah memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam upaya menangani kasus kekerasan kepada perempuan ini. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga atau unit pelaksanaan teknis yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) terletak di tengah Kota Yogyakarta tepatnya di Jalan Batikan nomor 20 Kecamatan Umbulharjo. UPT PPA sebagai lembaga layanan terpadu yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. UPT PPA Kota Yogyakarta adalah unit pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis

gender yang meliputi penerimaan pengaduan, layanan psikologis, hukum pidana, hukum perdata, hukum non litigasi, jasa persidangan dan perujukan kasus.

Pemerintah Kota membentuk UPT PPA untuk memberikan pelayanan yang bersifat kuratif yang pada saat tertentu UPT PPA melakukan kegiatan *preventif* maupun *promotive*. Hal ini dilakukan khususnya bagi korban kekerasan perempuan berbasis gender. Dengan adanya UPT ini, Pemerintah Kota menjangkau sampai ke wilayah agar masyarakat yang mengalami kekerasan pada perempuan dan anak berbasis gender dapat dijangkau oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan ketugasan memberikan pelayanan, penanganan, dan pendampingan korban kekerasan, PT PPA berkoordinasi dengan jejaring kerja bersama dengan berbagai lembaga *government* maupun *non government* yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Gender (FPKK) Kota Yogyakarta di antaranya:

- a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- b. Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. FPKK Kecamatan
- d. Mitra Keluarga
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat
- f. Aparat Penegak Hukum
- g. Layanan Kesehatan
- h. Akademisi
- i. Dinas Sosial

Visi dan Misi.

- a. Visi
Terwujudnya kemandirian, keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak.
- b. Misi

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan kebijakan yang responsif gender, berkesetaraan dan berkeadilan gender.
- 3) Mewujudkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam menjalankan tugasnya UPT PPA bermitra dengan berbagai pihak salah satunya adalah kelompok sukarelawan yang menjadi mitra paling dekat dengan masyarakat. Kelompok sukarelawan ini disebut dengan Satgas SIGRAK. Tugas dari satgas ini adalah untuk menjadi perpanjangan tangan dari UPT PPA. Tugas dari satgas ini adalah untuk memberikan laporan jika ditengarai terjadi kasus kekerasan berbasis gender dalam masyarakat, selain itu juga menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan kekerasan perempuan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan kepada identitas gender yang mereka miliki. Kekerasan berbasis gender ini bisa dialami oleh gender apa saja, baik laki-laki, perempuan atau jenis kelamin lainnya. Namun dalam masyarakat yang berbasis budaya patriarki, kekerasan berbasis gender ini memang lebih banyak dialami oleh perempuan.

Mansour Fakih (2020) menyebutkan bahwa kekerasan dapat didefinisikan sebagai serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia memiliki berbagai sumber, latar belakang dan alasan. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan adanya anggapan gender (*gender related violence*). Kekerasan ini terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada masyarakat yang melekat pada identitas gender tersebut. Beberapa bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai

kekerasan berbasis gender adalah : pemerkosaan (*rape*) termasuk di dalam perkawinan, serangan fisik (*domestic violence*), penyiksaan anak (*child abuse*) dan pelacuran (Purwanti, 2020). Namun dalam praktek dan perkembangannya, bentuk kekerasan kepada perempuan berbasis gender semakin banyak dan semakin berkembang, termasuk yang marak saat ini adalah kekerasan perempuan berbasis gender di media *on-line*. Dalam penelitian (Fu, 2015) (Merry, 2009), menilai bahwa dalam kekerasan berbasis gender perlu ditelaah untuk menghindari dampak psikologis dan penjelasan deterministik biologis yang menaturalisasi kekerasan. Kekerasan gender 'tertanam' dalam pola kekerabatan dan perkawinan yang langgeng, namun bisa diperparah dengan sangat kontemporer ketegangan politik dan ekonomi. Lebih luas, dapat menjadi masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan fitur utama dalam krisis kemanusiaan.

Dalam masyarakat ada banyak sekali bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Namun yang menjadi fokus dari UTP PPA adalah kekerasan kepada perempuan yang berbasis gender. Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender. Perbedaan latar belakang munculnya kekerasan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan penanganan dan penyelesaiannya sehingga sebagai sukarelawan bagi UPT PPA satgas SIGRAK mesti memiliki pemahaman yang cukup dalam memahami dan mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan tersebut dan fokus kepada kekerasan kepada perempuan yang berbasis gender.

Kesulitan yang dialami oleh satgas dalam menjalankan tugasnya adalah kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi apakah sebuah kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan

kekerasan berbasis gender atau kasus kekerasan pada umumnya. Dengan adanya persoalan ini, maka memberikan pembekalan terkait dengan tugas teknis saja tidak cukup, namun diperlukan pembekalan kepada satgas terkait dengan pengertian dan perbedaan kekerasan perempuan berbasis gender dan kekerasan perempuan secara umum.

Tahap-tahap pemberdayaan :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan/ketrampilan agar terbuka wawasan dan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar kepada kemandirian.

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan :

1. Memberikan pengetahuan tentang kekerasan perempuan berbasis gender.
2. Memberikan pemahaman tentang perbedaan kekerasan perempuan berbasis gender dengan kekerasan perempuan secara umum.
3. Memberikan kemampuan dan ketrampilan agar bisa mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan berbasis gender dengan kasus kekerasan pada umumnya.

2. METODE PENGABDIAN

Proses idenfikasi terhadap kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini dilakukan dengan penyuluhan. Namun untuk lebih bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap persoalan tersebut di lapangan, dan lebih sesuai dengan kenyataan, maka penyuluhan ini juga menggunakan metode

komunikasi dua arah atau dengan diskusi (*sharing*).

Kegiatan diskusi dan *sharing* dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Juli 2022, bertempat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Mataram, dengan proses sebagai berikut :

N O.	KEGIATAN	NARASUMBER
1.	Penyampaian pengalaman lapangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	Perwakilan SIGRAK Kec. Wirobrajan, Kec. Bumijo dan Kec. Kraton.
2.	Penyampaian Materi : Konstruksi gender dan budaya patriarki. Proses dan potensi konstruksi gender sebagai sumber tindakan kekerasan terhadap perempuan.	Dwi Astuti, S.Sos, M.Si (UWM)
3.	Tanya Jawab/diskusi/ <i>sharing</i>	Relawan SIGRAK dan Dwi Astuti, S.Sos, M.Si.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan identitas gender yang mereka miliki. Kekerasan berbasis gender ini bisa dialami oleh gender apa saja, baik laki-laki, perempuan atau jenis kelamin lainnya. Namun dalam masyarakat yang berbasis budaya patriarki, kekerasan berbasis gender ini memang lebih banyak dialami oleh perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini belum hilang dari tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Berbagai macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan terus terjadi mulai dari kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologi dan masih banyak lagi jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan. Dalam beberapa waktu terakhir bahkan angka kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat. Dari berbagai pengamatan dan pengakuan, salah satu sebab masih munculnya kekerasan terhadap perempuan adalah karena adanya relasi gender yang tidak setara (*gender in-equality*). Relasi yang tidak setara menjadi potensi sikap-sikap yang merendahkan dan berujung pada tindakan kekerasan kepada perempuan. *Gender in-equality* banyak dirasakan dalam masyarakat khususnya yang memiliki budaya atau norma yang bersifat patriarki.

Tidak semua kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan kekerasan yang berdasarkan pada relasi gender. Banyak juga kasus kekerasan yang dialami perempuan berlatar belakang ekonomi, kriminal dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari gender *in-equality* perlu kehati-hatian dan pemahaman khusus untuk bisa membedakan fenomena kekerasan terhadap perempuan berdasarkan relasi gender.

Proses pengidentifikasian kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini membutuhkan pemahaman terhadap relasi ketidakadilan gender itu sendiri, sehingga untuk mampu mengidentifikasi diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang konstruksi *gender in-equality* dan memahami bagaimana *gender in-equality* ini kemudian bisa mendasari munculnya kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, proses penyuluhan

tentang pengertian kekerasan perempuan berbasis gender dan proses identifikasi kasus kekerasan yang terjadi, dilakukan secara bersamaan. Forum memulai untuk melakukan *sharing* pengalaman dan pada saat yang sama juga diberikan pemahaman, pengertian dan batasan-batasan tentang kekerasan perempuan berbasis gender. Secara garis besar, proses penyuluhan dan diskusi dibagi menjadi dua tahap (sessi), dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tahap (Sesi) 1 :

- Peserta menceritakan tentang kekerasan yang terjadi dan telah didampingi selama ini, secara rinci terkait tentang korban dan pelaku, proses terbentuknya kekerasan, sebab atau alasan melakukan kekerasan dan jenis / bentuk kekerasan.
- Di tengah-tengah proses berbagi cerita berlangsung, juga dilakukan penyampaian materi tentang batasan dan pengertian kekerasan perempuan berbasis gender, sehingga pada saat yang sama juga mengidentifikasi apakah kekerasan yang mereka dampingi merupakan kekerasan berbasis gender atau bentuk kekerasan yang lainnya.

b. Tahap (Sesi) 2:.

- Peserta menceritakan dan mendiskusikan tentang proses pendampingan yang sudah dilakukan, perkembangan dari penanganan yang sudah dilakukan sampai saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengatasi kekerasan.
- Pada saat yang sama juga diberikan materi tentang proses pemberdayaan untuk mengantisipasi dan memberikan solusi bagi korban kekerasan berbasis gender.
- Forum mengidentifikasi kemungkinan strategi yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi tindak kekerasan perempuan berbasis gender dan menangani korban kekerasan berbasis gender, yang merupakan gabungan solusi secara teoritis dan solusi dalam kenyataan.

Hasil identifikasi strategi ini menjadi rekomendasi bagi proses pendampingan kekerasan berbasis tradisi.

Melalui serangkaian diskusi dalam PKM ini, dalam kenyataan di lapangan ada beberapa fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus kekerasan perempuan. Beberapa catatan penting dari kasus kekerasan perempuan di masyarakat Yogyakarta, antara lain :

- Kekerasan yang dialami perempuan dan anak perempuan bergerak pada persoalan yang terkait dengan keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi menjadi pemicu dan alasan munculnya tindakan menyakiti perempuan dan anak perempuan dalam bentuk kekerasan verbal dan pembatasan hak atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami/bapak.
- Sikap menentang kekerasan atau melawan terhadap kekerasan justru berujung pada kekerasan fisik seperti pemukulan, tamparan dan lain sebagainya.
- Dua bentuk kekerasan yang terjadi secara berturut-turut akhirnya memunculkan pada trauma. Ketika trauma juga tidak teratasi, maka mengarah kepada depresi. Dan akhirnya perempuan atau anak perempuan menjadi individu yang kehilangan jati diri, tidak bisa menjalankan aktivitas secara normal, bahkan ada yang masuk kategori ODGJ dan harus dirawat di rumah sakit.
- Ketika menjalani hidupnya sebagai orang yang berkekurangan atau depresi, masyarakat pun justru meminggirkan dia.

Dari pemaparan beberapa kasus tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa satu ide/gagasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan tidak hanya akan berdampak pada satu akibat. Kondisi korban ketika berhimpitan dengan stigma masyarakat, membuat korban justru jatuh dalam kekerasan-kekerasan selanjutnya. Dari

satu tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan tidak hanya memberikan dampak sementara tetapi memberikan dampak dalam jangka waktu panjang bahkan bisa saja berdampak selama seluruh sisa kehidupannya.

Tindakan kekerasan tidak muncul dengan tiba-tiba. Tindakan kekerasan dilatarbelakangi oleh cara berpikir seseorang yang dipengaruhi oleh pengetahuannya. Begitu juga dengan kecenderungan kekerasan kepada perempuan atau anak perempuan, tidak lahir begitu saja, namun dilatarbelakangi oleh konstruksi gender. Dengan argumentasi ini semakin meyakinkan pendapat bahwa konstruksi terhadap relasi gender sebenarnya merupakan faktor yang sangat potensial dalam melahirkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Konstruksi tentang relasi gender terbentuk sejak masih kecil dan dari dalam ruang pendidikan paling kecil yaitu keluarga, contohnya : dalam memilih mainan selalu saja orang tua menentukan terlebih dahulu jenis mainan yang akan diberikan berdasarkan konstruksi gender, ketika anaknya perempuan maka mainannya adalah alat rias, boneka dan alat memasak. Sementara jika anaknya laki-laki dibelikan mainan bola, pistol, sepeda, mobil dan lain-lain. Contoh lain konstruksi relasi gender ini dibentuk saat anak bertumbuh adalah ketika orang tua membagi pekerjaan yang berbeda kepada anak dengan jenis kelamin yang berbeda. Anak perempuan selalu diberi pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak, mencuci piring, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Sementara itu untuk anak laki-laki lebih ke arah pekerjaan publik, misalnya disuruh membeli sesuatu, memperbaiki sepeda, memperbaiki mobil dan lain-lain. Bahkan dalam ungkapan kita sehari-hari dipenuhi dengan ungkapan yang sangat bias gender misalnya “*anak perempuan kok bangun siang*” (*cah wedok kok tangi awan*). Artinya kemudian jika anak

laki-laki boleh bangun siang? Atas dasar apa, pemikiran seperti ini? Apabila diakui dan diyakini bahwa potensi atau sumber kekerasan terhadap perempuan adalah konstruksi ketidakadilan gender, maka solusi untuk pencegahan terhadap kekerasan ini adalah dengan membangun konstruksi yang lebih adil gender. Membangun pola pikir yang lebih adil gender. Itu harus dikonstruksikan dari kecil, dimulai dari ruang yang paling kecil juga, yaitu keluarga.

Dalam diskusi peserta mengakui bahwa kesetaraan gender merupakan nilai yang ideal, nilai yang bagus dan ketidaksetaraan gender harus dihilangkan. Namun dalam kenyataannya, ini bukan merupakan persoalan yang mudah. Hal ini disebabkan karena norma yang ada di masyarakat kita, masih kental dengan konstruksi budaya patriarki. Beberapa nilai yang susah dirubah dan jika dirubah akan menimbulkan keanehan dalam masyarakat kita antara lain, pembagian pekerjaan publik dan domestik. Masyarakat kita baik laki-laki bahkan perempuan sendiri seperti sudah tersistem untuk membagi peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Karena sudah terkonstruksi sangat dalam sehingga jika ada individu atau keluarga yang bertukar peran, maka dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Misalnya : laki-laki melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci baju, memasak, mencuci piring dan lain lain. Bagi individu laki-laki itu sendiri tidak masalah, pihak istri juga tidak masalah namun mereka menjadi canggung melakukan itu karena dianggap aneh oleh masyarakat secara umum, dan akhirnya mereka "*malu*" untuk melakukan itu. Sudah seperti ini kedalaman konstruksi gender terbentuk dalam masyarakat kita. Berhadapan dengan norma masyarakat yang menganggap aneh inilah yang membuat upaya kesetaraan gender bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Dalam kenyataan di lapangan juga ditemukan bahwa posisi tawar perempuan yang tinggi, bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakadilan gender. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, dimana ketika istri awalnya kurang dihargai ketika hanya bekerja di ranah domestik, namun ketika bisa mencari uang sikap suami pelan-pelan berubah. Dengan lebih menghargai dan mau melakukan pekerjaan domestik meskipun dicibir tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa posisi tawar perempuan yang berdaya secara ekonomi berdampak secara langsung terhadap sikap relasi gender. Kondisi ini semakin menguatkan teori bahwa relasi patriarki yang membatasi hak dan kesempatan perempuan adalah sumber relasi gender yang tidak setara dan relasi gender yang tidak setara adalah potensi tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Diakui bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Dalam kenyataan di lapangan beberapa keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama, cenderung juga melakukan tindakan semena-mena kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga dialami oleh laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan konsep kekerasan berbasis gender, yaitu bahwa kekerasan berbasis gender bukan kekerasan antar jenis kelamin, namun kekerasan yang didasarkan pada konstruksi peran laki-laki dan peran perempuan.

Kesetaraan gender harus diwujudkan, kesetaraan gender bukan tidak mungkin diwujudkan dalam norma yang patriarki, namun belum terwujud untuk saat ini. Untuk saat ini, mungkin masyarakat sudah mulai perlu mendialogkan norma patriarki yang ada. Mendialogkan dalam arti tetap menghormati norma namun ketika norma itu menimbulkan pembatasan atau menghalangi adanya hak bagi perempuan yang berdampak kepada posisi kemandirian

dan keberdayaan perempuan, maka norma itu sudah perlu untuk dikritisi atau didialogkan. Menjadi tugas bersama masyarakat untuk melakukan dialog tersebut atau melakukan negosiasi.



Gambar.1. Diskusi dengan relawan SIGRAK.



Gambar 2. Sharing dengan peserta PKM.

4. PENUTUP

Kekerasan terhadap perempuan tidak lahir begitu saja, ada cara berpikir yang melatarbelakangi tindakan tersebut yaitu ketidakadilan relasi gender dalam norma

patriarki. Dalamnya dan kuatnya konstruksi ini menyebabkan orang yang ingin berpikir kritis dan berbeda dari konstruksi tersebut menjadi “malu” atau “aneh”. Konsep “malu” dan “aneh” ini merupakan persoalan norma, dan ini menyebabkan susahnyanya mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat kita. Bukan berarti kita mempertahankan norma dan tidak mewujudkan kesetaraan gender, namun saat ini belum dan itu akan membutuhkan waktu.

Keberdayaan dan posisi tawar yang tinggi menghindarkan perempuan dari tindakan kekerasan berbasis gender sehingga perempuan harus berupaya untuk berdaya dan memiliki posisi tawar terhadap suami dalam arti lain tidak tergantung kepada suami/laki-laki. Kekerasan berbasis gender tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga dialami oleh laki-laki. Karena kekerasan berbasis gender bukan kekerasan antar jenis kelamin, namun kekerasan yang bersumber pada konstruksi peran laki-laki dan peran perempuan.

Dengan balutan norma yang masih sangat kuat dalam masyarakat kita, maka paling tidak yang bisa kita lakukan adalah, masih menghargai norma selama norma itu tidak menghalangi, tidak menghambat dan tidak menutup kesempatan perempuan untuk mencapai kemandiriannya dan keberdayaannya. Jika norma yang ada menghalangi, menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk mandiri dan berdaya, maka norma tersebut layak untuk dipertanyakan, didialogkan dan dinegosiasikan.

6. DAFTAR PERPUSTAKAAN

Mansour Fakih; Toto Raharjo. (2020).
Analisis gender & transformasi sosial / Mansour Fakih; penyunting Toto Rahardjo. Yogyakarta ::
Pustaka Pelajar.

Mengzhu , Fu , (2015) What will it take to end gender-based violence?, *Women's Studies Journal*, Volume 29 Number 2, December 2015: 50-59. ISSN 1173-6615

Merry, S. E. (2009). *Gender violence: A cultural perspective*. Oxford, England: Wiley-Blackwell.

Purwanti, Ani, (2020), *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.

Wawancara Erlina Hidayati (DP3AP2 DIY)